



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jalan Mayjen Sutoyo No. 10, Cililitan Jakarta Timur
Telepon: (021) 8091908, Faksimile: (021) 8002265
Laman: www.bphn.go.id

Nomor : PHN-UM.01.01-16 21 Januari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Dua berkas
Hal : Undangan Sosialisasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum
(IRH) kepada Kementerian/Lembaga

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di tempat

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Hukum No. 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) akan melaksanakan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan:

hari, tanggal : Senin, 26 Januari 2026

waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

tempat : Aplikasi Zoom

Meeting ID: 825 0017 5521

Passcode: 110607

<https://us06web.zoom.us/j/82500175521?pwd=khqVQW9KV80Td70cbTPHF4u7djgfd.1>

agenda : Sosialisasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) kepada
Kementerian/Lembaga (*rundown* terlampir)

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengundang Saudara serta pegawai yang ditunjuk untuk hadir pada kegiatan dimaksud.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Min Usihen

Tembusan:

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

Daftar Tujuan

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
6. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
14. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
21. Sekretaris Kementerian Pariwisata;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah;
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
30. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
33. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga;
34. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
35. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
36. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
37. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital;
38. Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi;
39. Sekretaris Kementerian Koperasi;

40. Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
41. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
42. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
43. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
44. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
45. Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
46. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan;
47. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
48. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
49. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
50. Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;
51. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara;
52. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
53. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional;
54. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara;
55. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
56. Sekretaris Badan Pangan Nasional;
57. Sekretaris Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;
58. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
59. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional;
60. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
61. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisik;
62. Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
63. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional;
64. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara;
65. Sekretaris Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
66. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara;
67. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
68. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut;
69. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
70. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
71. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional;
72. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional;
73. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
74. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
75. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial;
76. Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional;
77. Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
78. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
79. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia;
80. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
81. Sekretaris Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia;
82. Sekretaris Jenderal Majelis Pemusyawaratan Rakyat;
83. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
84. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
85. Sekretaris Mahkamah Agung;
86. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

87. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
88. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
89. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi;
90. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
91. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
92. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
93. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
94. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
95. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Lampiran II Surat Kepala BPHN
 Nomor : PHN-UM.01.01-16
 Tanggal : 21 Januari 2026

Rundown Kegiatan Sosialisasi Penilaian IRH kepada Kementerian/Lembaga

WAKTU (WIB)	KEGIATAN	
09.00 – 09.10	Laporan Kegiatan Sosialisasi oleh Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional	
09.10 – 09.30	Sambutan dan Arahan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional	
09.30 – 09.45	Proses (<i>Breakout Room Zoom</i>) berdasarkan wilayah	
09.45 – 12.00	Pelaksanaan Sosialisasi Per Wilayah	
	Sosialisasi Wilayah 1 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Sekretariat Negara; 4. Kementerian Luar Negeri; 5. Kementerian Ketenagakerjaan; 6. Kementerian Pertahanan; 7. Kementerian Hukum; 8. Kementerian Komunikasi dan Digital; 9. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 10. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 11. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; 12. Badan Intelijen Negara; 13. Badan Siber dan Sandi Negara; 14. Badan Keamanan Laut; 15. Badan Pengawas Pemilihan Umum; 16. Arsip Nasional Republik Indonesia; 17. Badan Nasional Pengelola Perbatasan; 18. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 19. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;	Koordinator Wilayah 1: Adharinalti (08158899812) Narahubung: Willy (087837480808)
	Sosialisasi Wilayah 2 1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;	Koordinator Wilayah 2: Raymon (081297844674) Narahubung: Astri (081281546241)

WAKTU (WIB)	KEGIATAN	
	3. Kementerian Sosial; 4. Kementerian Agama; 5. Kementerian Haji dan Umrah; 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 8. Kementerian Transmigrasi; 9. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; 10. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 11. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; 12. Ombudsman Republik Indonesia; 13. Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 15. Badan Standardisasi Nasional; 16. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 17. Mahkamah Agung; 18. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 19. Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara; 20. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;	
	Sosialisasi Wilayah 3 1. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Masyarakat; 2. Kementerian Perindustrian; 3. Kementerian Perhubungan; 4. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 5. Kementerian Pekerjaan Umum; 6. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 7. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; 8. Kementerian Koperasi; 9. Badan Kepegawaian Negara; 10. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 11. Badan Narkotika Nasional 12. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;	Koordinator Wilayah 3: Dian (08157919007) Narahubung: Wawan (081806107385)

WAKTU (WIB)	KEGIATAN	
	13. Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 14. Badan Pusat Statistik 15. Komisi Pemberantasan Korupsi; 16. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 17. Badan Pangan Nasional; 18. Badan Informasi Geospasial; 19. Badan Gizi Nasional; 20. Otorita Ibu Kota Nusantara;	
	Sosialisasi Wilayah 4 1. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; 2. Kementerian Perdagangan; 3. Kementerian Pariwisata; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Keuangan; 6. Kementerian Kesehatan; 7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; 11. Kementerian Kebudayaan; 12. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 13. Lembaga Administrasi Negara; 14. Perpustakaan Nasional; 15. Kejaksaan Agung Republik Indonesia; 16. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat; 17. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah; 18. Komisi Yudisial; 19. Badan Pemeriksa Keuangan;	Koordinator Wilayah 4: Indra Hendrawan (08568385953) Narahubung: Izki (081290811292)

WAKTU (WIB)	KEGIATAN	
	Sosialisasi Wilayah 5 1. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; 2. Kementerian Koordinator Bidang Pangan; 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 4. Kementerian Pertanian; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Kementerian Hak Asasi Manusia; 7. Kementerian Kehutanan; 8. Kementerian Ekonomi Kreatif; 9. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 10. Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia; 11. Lembaga Ketahanan Nasional; 12. Komisi Pemilihan Umum; 13. Sekretariat Jenderal Majelis Pemusyawaratan Rakyat; 14. Badan Pengawasan Obat dan Makanan; 15. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; 16. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan 17. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.	Koordinator Wilayah 5: Wulan Prihandini (081281333885) Narahubung Beni (087882374396)